



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

NOMOR: SDM-SM.02.03-011974

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama : Annisa Rahmi Faisal, S.Sy., M.H
NIP/NRP : 199309212025062005
Tempat/ Tanggal Lahir : Bogor, 21 September 1993
Pangkat/Golongan Ruang : III/b, Penata Muda Tk.I
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Instansi/Unit Kerja : Universitas Negeri Jakarta
Kualifikasi : SANGAT MEMUASKAN

LULUS

pada *Training of Facilitator* Implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan V Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025 di Depok yang meliputi 80 jam pelajaran.

Depok, 13 Agustus 2025
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

DAFTAR MATA PELATIHAN

1. *Overview* Kampus Pengayoman Pancasila (3 JP);
2. *Overview Training Of Facilitator* Implementasi KUHP (3 JP);
3. Ceramah : Pembinaan Ideologi Pancasila (2 JP);
4. Building Learning Commitment (BLC) (3 JP);
5. Sejarah KUHP di Indonesia (4 JP);
6. Subjek Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP baru (4 JP);
7. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Berekspresi dalam KUHP baru (4 JP);
8. Pidana, Tindak Pidana, dan Tindakan (4 JP);
9. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pidana (4 JP);
10. Kesalahan, dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf dalam KUHP baru (4 JP);
11. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana (4 JP);
12. Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana (4 JP);
13. Tindak Pidana Kesusilaan (4 JP);
14. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (4 JP);
15. Tindak Pidana Khusus (4 JP);
16. Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (4 JP);
17. Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana (4 JP);
18. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (4 JP);
19. Mempertunjukkan alat pencegah Kehamilan, Alat Pengguguran Kandungan dan Aborsi (4 JP);
20. Tindak Pidana Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan dan Alasan Pembena (4 JP);
21. Konsep dan Teknik Dasar Fasilitasi (5 JP).

Depok, 13 Agustus 2025
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida